

## Study Kasus Pelanggaran Pancasila: Analisis Deskriminasi Di Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga

Azifa Monzafanika<sup>1</sup>, Ghofil Irham Joka<sup>2</sup>, Hilya Nabila<sup>3</sup>, Mukhammad Jal Fadil<sup>4</sup>, Siska Widyawati<sup>5</sup>

<sup>1234</sup> S1 PGSD Widyaswara Indonesia  
STKIP Widyaswara Indonesia

<sup>1</sup>[azifamonzafanikaa@gmail.com](mailto:azifamonzafanikaa@gmail.com), <sup>2</sup>[irhamghofil@gmail.com](mailto:irhamghofil@gmail.com), <sup>3</sup>[hilyanabilla70@gmail.com](mailto:hilyanabilla70@gmail.com), <sup>4</sup>[Mhdjalpadil@gmail.com](mailto:Mhdjalpadil@gmail.com),  
<sup>5</sup>[siskawidyawati555@gmail.com](mailto:siskawidyawati555@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelanggaran nilai-nilai Pancasila terhadap kedisiplinan di SMA Negeri 1 Cimarga dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur dan berita terkait peristiwa yang terjadi. Fokus penelitian adalah kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap siswa yang kedapatan melanggar aturan, yang melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolah menimbulkan ketidakjujuran siswa, menurunkan kepercayaan orang tua peserta didik terhadap pihak sekolah, serta memicu aksi mogok sebagai bentuk protes, sehingga menciptakan tingkat kedisiplinan siswa menurun. Peneliti menyarankan penerapan sistem pendisiplinan yang adil tanpa kekerasan, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), implementasi nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, serta kerjasama aktif dengan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan mampu membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Nilai-Nilai Pancasila, Pelanggaran Pancasila, Kedisiplinan, Sikap dan Perilaku

### PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi terbuka, yang bersifat orisinal. Kelima sila Pancasila ini bersifat universal sehingga dapat ditemukan juga dalam gagasan berbagai masyarakat lainnya. Pancasila juga menjadi pedoman hidup yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dilaksanakan sebaik mungkin pengalaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila harus dilaksanakan oleh segenap bangsa dan negara. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Rizqullah & Najicha, 2022).

Menurut (Saraswati et al., 2019) sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang terdiri dari berbagai komponen yaitu siswa, guru, kepala sekolah, staff tata usaha, dan lain sebagainya yang secara bersama-sama berada dalam suatu lembaga, dan bersama-sama pula mengatur dan membina serta menyelenggarakan program-program yang ditentukan dan diatur oleh dinas pendidikan. Dalam upaya memudahkan pelaksanaan program yang sudah ada, maka sekolah membuat peraturan dan tata tertib sekolah. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap tata tertib sekolah itu sendiri, kurangnya dukungannya dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya tata tertib sekolah yang diterapkan disekolah. Adanya peraturan tata tertib tersebut diharapkan dapat dijadikan rambu-rambu dalam berperilaku bagi semua individu dalam kegiatan proses pendidikan disekolah, misalnya bagaimana siswa berperilaku terhadap sesama teman, guru, kepala sekolah dan semua komponen yang ada didalamnya.

Namun, perkembangan arus informasi dan pengaruh budaya global telah menciptakan dinamika baru yang memengaruhi cara pandang dan perilaku generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Fenomena yang mengkhawatirkan adalah menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Hal ini tercermin dari meningkatnya kasus bullying, intoleransi, dan degradasi moral di lingkungan sekolah (Jabbar et al., n.d.).

Dalam konteks pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa. Realitas di SMA Negeri 1 Cimarga menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diamalkan secara konsisten. Contohnya, terdapat kasus siswa merokok di lingkungan sekolah dan tindakan tidak profesional dari tenaga pendidik dalam menegakkan aturan. Fenomena ini mencerminkan lemahnya implementasi nilai kemanusiaan, keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab prinsip utama dalam Pancasila.

Permasalahan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Cimarga semakin kompleks karena metode pembelajaran Pancasila belum diperbarui secara memadai. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di luar

sekolah masih rendah, sehingga proses pembentukan karakter siswa tidak berjalan optimal. Kondisi ini semakin diperburuk oleh terjadinya pelanggaran nilai Pancasila baik oleh siswa maupun tenaga pendidik, seperti tindakan kekerasan fisik dalam menegakkan disiplin dan penanganan kasus yang tidak adil akibat intervensi pihak tertentu. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa, baik faktor internal maupun eksternal menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pendidikan Pancasila (Jabbar et al., n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran nilai Pancasila yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa dan pendidik di SMA Negeri 1 Cimarga, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pelanggaran baik dari sisi pendidik atau siswa. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi sekolah dalam membina kedisiplinan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi nilai Pancasila dalam tata kelola kedisiplinan sekolah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menganalisis fenomena pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kedisiplinan di SMA Negeri 1 Cimarga. Menurut (Sari et al., 2022) metode ini merupakan pendekatan pemecahan masalah yang menekankan penguraian situasi atau kondisi objek penelitian secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari tinjauan pustaka, dokumen, jurnal, dan sumber resmi lainnya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi literatur dan penelaahan berbagai sumber yang relevan terkait peristiwa kekerasan di SMA Negeri 1 Cimarga, termasuk laporan berita dan dokumen pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran nilai Pancasila, faktor penyebab, dampaknya terhadap sekolah, pendidik, peserta didik, dan orang tua, serta upaya penanganan yang telah atau dapat dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berjalan secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial (Marlangan Febri et al., 2020). Lembaga pendidikan memegang peran penting dalam membentuk karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya yang optimal juga harus dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan anak yang berkualitas dilingkungan sekolah. Tujuan utamanya yaitu menjadikan suatu atmosfer atau suasana pembelajaran yang aman serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perilaku merugikan lainnya yang dapat mengancam kesejahteraan fisik, mental, dan moral anak-anak (Dewi et al., 2020).

Kasus diskriminasi dalam dunia pendidikan masih terjadi sepanjang tahun 2025, merujuk kepada informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2025 mencapai 18.020 kasus kekerasan pada anak. Tindakan diskriminasi pada anak khususnya di lingkungan sekolah mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar Pancasila, hal ini tidak hanya mencederai hubungan antara pendidik dan peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan penyelesaian masalah melalui cara yang beradab seperti yang tercantum dalam Sila ke-2. Berbagai kekerasan yang dialami murid di sekolah apabila diklasifikasikan, bisa menjadi tiga kategori, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan verbal atau psikis, dan kekerasan simbolis (Christiana, E. 2019; Martono, N.2021). Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimpa fisik atau bagian-bagian tubuh seseorang, seperti ditambar, dicubit, dipukul, dijewer, ditendang, atau berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya, termasuk juga kekerasan seksual. Bentuk kekerasan lainnya yang dapat diidentifikasi terhadap korban, antara lain adalah : (1) kekerasan langsung; (2) kekerasan tidak langsung; (3) kekerasan represif; (4) dan kekerasan alienatif (Budirahayu, 2022). Dengan contoh nyata terjadi kasus di SMA Negeri 1 Cimarga dimana seorang siswa kedapatan merokok dan kemudian mendapat tamparan dari kepala sekolah sebagai bentuk hukuman secara langsung. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, karena merugikan martabat siswa dan menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan disiplin.

### Pembahasan

#### Perilaku Yang Melanggar Nilai Pancasila

Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan yang melanggar norma, etika, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah, baik berupa tindakan fisik maupun pelanggaran terhadap hak individu. Perilaku ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua atau wali, bahkan masyarakat sekitar. Tindakan kekerasan dalam lingkungan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai perilaku agresif terhadap individu, tetapi bentuk penyimpangan terhadap prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar penyelenggara pendidikan nasional. Akibatnya, proses pendidikan tidak lagi berjalan sebagai ruang pembinaan, melainkan menjadi pengalaman yang dapat melukai perkembangan moral, emosional, dan sosial peserta didik. Dengan demikian, tindakan kekerasan tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia serta penyelesaian masalah yang beradab.

Tindakan kekerasan dalam konteks pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kekerasan fisik atau verbal terhadap peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan yang menjadi fondasi nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks pelanggaran tersebut, kekerasan terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga. Kejadian bermula ketika seorang

siswa kedapatan merokok saat kegiatan Jumat Bersih. Kepala sekolah yang melihat peristiwa tersebut memanggil siswa dari jarak jauh dengan nada keras, namun siswa berlari dan kemudian tidak mengakui perbuatannya ketika dimintai keterangan. Respon kepala sekolah langsung menampar siswa sebagai hukuman langsung menunjukkan penggunaan otoritas secara berlebihan dan tidak sesuai prinsip kemanusiaan serta keadilan dalam pendidikan. Tindakan tersebut kemudian memicu laporan orang tua ke polisi dan menonaktifkan kepala sekolah dalam beberapa kurun waktu dan juga memicu solidaritas dari ratusan siswa yang melakukan aksi mogok sekolah sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Tindakan kekerasan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga bukan hanya melanggar norma etika pendidikan, tetapi juga bentuk pelanggaran dan penyimpangan nilai fundamental Pancasila, yakni Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” karena kekerasan fisik tersebut tidak hanya mencederai martabat siswa sebagai individu, tetapi juga mencerminkan sikap yang tidak mengindahkan prinsip kasih sayang, saling menghargai dan menghormati terhadap peserta didik. Ketidadaan pendekatan yang etis dan beradab, serta penggunaan otoritas secara represif menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan tidak dijadikan pedoman dalam proses pendisiplinan. Seharusnya pendidikan berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil, beradab, dan menjunjung penghormatan setiap orang. Apabila nilai kemanusiaan diterapkan secara konsisten, maka lingkungan pendidikan akan terbangun sebagai ruang yang aman, saling menghormati, dan mendukung pengembangan karakter peserta didik secara harmonis.

Selain itu, tindakan yang tidak proporsional dalam proses pendisiplinan juga menciderai Sila Kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini mengandung prinsip bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil, rasional, dan sesuai dengan kaidah pembinaan yang edukatif. Ketika kepala sekolah memberikan hukuman fisik berupa tamparan terhadap siswa, tindakan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam mekanisme pendisiplinan. Siswa tidak memperoleh kesempatan untuk diperlakukan secara objektif atau mendapatkan pembinaan berbasis dialog dan pemahaman, melainkan menerima respons yang represif dan tidak mendidik. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam dunia pendidikan, yang seharusnya mengutamakan pembinaan karakter melalui pendekatan humanis, bukan tindakan fisik yang bersifat menghukum. Dengan demikian, insiden tersebut tidak hanya merusak rasa keadilan bagi siswa sebagai individu, tetapi juga memperlihatkan bahwa nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks pendidikan, keadilan sosial berarti bahwa setiap peserta didik harus mendapatkan proses penegakan aturan yang transparan, berimbang, dan tidak disertai tindakan yang merugikan martabatnya.

Ketika prinsip kemanusiaan dan keadilan tidak diterapkan, siswa cenderung merespons dengan ketakutan atau menutup diri, bukan dengan kepatuhan dan tanggung jawab yang edukatif. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin yang dibangun melalui kekerasan justru kontraproduktif dan mengikis implementasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, tindakan represif seperti ini juga memicu ketidakpercayaan orang tua terhadap sekolah, menurunkan citra profesional guru, serta memicu protes atau mogok sekolah oleh siswa sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan kekerasan kepada peserta didik.

### Faktor Penyebab

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Faisal & Simatupang, 2021) terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Beberapa faktor penyebab tersebut sejalan dengan penelitian ini, antara lain:

**a. Kekerasan kerap terjadi apabila anak tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan guru atau pihak sekolah**

Hal ini sejalan dengan penelitian ini, karena dalam konteks pendidikan, salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan adalah ketika peserta didik dianggap tidak mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Ketidakpatuhan siswa sering dipersepsikan oleh pendidik atau pihak sekolah sebagai bentuk perlawanan, ketidaksopanan, atau ketidakdisiplinan yang harus segera dikoreksi. Namun, dalam beberapa praktik, respons yang diberikan oleh pendidik tidak lagi bersifat edukatif, melainkan berubah menjadi tindakan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi ketika pendidik mengandalkan pendekatan otoriter dan berorientasi pada hukuman fisik sebagai cara untuk menegakkan aturan.

**b. Guru lebih cenderung memiliki persepsi**

Dalam penelitian ini, salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah adalah kecenderungan guru atau kepala sekolah menilai perilaku siswa hanya dari tindakan yang tampak, tanpa menggali latar belakang mengapa perilaku itu muncul. Ketika pendidik tidak memahami kondisi psikologis, lingkungan keluarga, atau tekanan yang dialami siswa, respons terhadap pelanggaran sering menjadi reaktif dan tidak proporsional, sebagaimana terjadi pada kasus penamparan di SMA Negeri 1 Cimarga. Oleh karena itu, pendidik seharusnya memiliki pemahaman mengenai kondisi siswa agar proses pembinaan dapat dilakukan secara tepat, humanis, dan sesuai dengan prinsip pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

**c. Kekerasan dianggap oleh guru sebagai tindakan pendisiplinan anak didik.**

Tindakan kesalahan atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anak didik seringkali berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh guru. Kekerasan baik secara fisik maupun psikis, oleh para guru dianggap sebagai sebuah tindakan yang mampu dan ampuh mendisiplinkan anak didiknya. Padahal anggapan tersebut salah. Kekerasan bukan cara yang efektif untuk mendisiplinkan, mengubah perilaku, atau untuk memotivasinya anak didik. Dalam penelitian ini, cara pandang yang keliru terhadap disiplin inilah yang turut menyebabkan munculnya tindakan kekerasan, sebagaimana terlihat pada kasus penamparan siswa di SMA Negeri 1 Cimarga. Praktik seperti ini menandakan perlunya pendekatan pendisiplinan yang lebih edukatif, humanis, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

**d. Dari pola asuh dalam keluarga**

Pola asuh dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan kedisiplinan peserta didik. Anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan pola asuh otoriter atau keras sering kali membangun asosiasi bahwa kedisiplinan identik dengan hukuman dan tekanan. Akibatnya, mereka dapat menunjukkan respons yang defensif, takut, atau bahkan tidak jujur ketika menghadapi teguran di sekolah. Sementara itu, anak yang berasal dari keluarga dengan pola asuh permisif cenderung kurang memahami batasan perilaku, sehingga lebih rentan melakukan pelanggaran disiplin.

### Dampak

Berdasarkan hasil analisis, beberapa dampak yang bisa timbul akibat tindakan kekerasan di lingkungan sekolah adalah :

#### a. Sekolah

Kasus kekerasan yang terjadi mengurangi citra dan kepercayaan publik terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya aman dan humanis. Reputasi sekolah dapat menurun, hubungan dengan orang tua siswa menjadi kurang baik, serta menimbulkan tekanan dari masyarakat maupun pihak berwenang untuk melakukan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pembinaan siswa.

#### b. Pendidik

Bagi pendidik, tindakan kekerasan menimbulkan citra negatif terhadap profesionalisme guru dan kompetensi pedagogik dalam menangani pelanggaran siswa. Guru menjadi lebih diawasi, harus meningkatkan pemahaman mengenai pendekatan disiplin yang edukatif, serta menghadapi risiko menurunnya wibawa jika tidak mampu menerapkan metode pembinaan yang sesuai dengan etika profesi.

#### c. Peserta Didik

Kasus kekerasan menimbulkan rasa takut, tidak aman, dan hilangnya kepercayaan siswa terhadap pihak sekolah. Situasi ini membuat sebagian peserta didik memilih mogok sekolah sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidaknyamanan mereka terhadap lingkungan belajar yang dianggap tidak melindungi hak dan martabat siswa. Kondisi ini bukan hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga memengaruhi motivasi, kestabilan emosional, dan hubungan siswa dengan otoritas sekolah.

#### d. Orang Tua Siswa

Menimbulkan hilangnya rasa percaya orang tua terhadap sekolah sebagai institusi yang seharusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan anak. Orang tua menjadi khawatir terhadap keselamatan putra-putrinya dan mempertanyakan profesionalitas pendidik dalam menangani pelanggaran disiplin. Situasi ini mendorong sebagian orang tua untuk melakukan protes, menuntut klarifikasi, bahkan mempertimbangkan memindahkan anak ke sekolah lain karena merasa fungsi sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang aman dan mendidik tidak terpenuhi.

### Upaya

Ketika prinsip kemanusiaan dan keadilan tidak diterapkan, mengakibatkan siswa cenderung ketakutan atau menutup diri. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin yang dibangun melalui kekerasan justru kontraproduktif dan mengikis implementasi nilai-nilai moral. Selain itu, tindakan represif seperti ini juga memicu ketidakpercayaan orang tua terhadap sekolah, menurunkan citra profesional guru, serta memicu protes atau mogok sekolah oleh siswa sebagai bentuk penolakan terhadap perlakuan yang tidak adil. Pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, sebagaimana tercantum pada Pasal 54 dan Pasal 76C. Ketentuan ini menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman bagi peserta didik, sehingga setiap tindakan fisik yang merugikan, termasuk tamparan atau hukuman corporal, merupakan pelanggaran hukum. Norma ini sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Dalam Lembaga pendidikan, kebutuhan akan sistem pendisiplinan yang adil tanpa kekerasan menjadi sangat penting. Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa setiap kasus pelanggaran disiplin ditangani secara objektif, transparan, dan edukatif. TPPK berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang mengedepankan dialog, pemahaman konteks perilaku siswa, dan penyelesaian masalah secara humanis. Pendekatan ini memastikan proses pendisiplinan tetap konsisten dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis siswa.

Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah memerlukan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi dalam proses pendidikan. Langkah pertama adalah implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum dan praktik sehari-hari, sehingga peserta didik memahami makna sila-sila dan mampu menerapkannya dalam interaksi sosial, termasuk nilai kemanusiaan, keadilan, dan saling menghormati. Penanaman nilai ini dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan guru, kegiatan ekstrakurikuler, serta musyawarah dan gotong royong di lingkungan sekolah. Selain itu, kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua siswa menjadi kunci untuk mendukung pendisiplinan yang efektif dan beradab. Komunikasi dua arah memungkinkan orang tua memahami perilaku anak, memberikan dukungan di rumah, dan menyesuaikan pendekatan pembinaan sesuai kebutuhan psikologis dan karakter siswa. Penguatan SOP disiplin berbasis nilai Pancasila serta implementasi prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan martabat melalui keteladanan guru, kegiatan pembelajaran, dan kolaborasi dengan orang tua, menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman, mendidik, dan mampu membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan etika dan moral Pancasila. Upaya ini memastikan bahwa setiap tindakan pembinaan siswa sesuai prinsip kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan martabat manusia. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan



lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan mampu membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila dalam pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan sistematis dan humanis. Sekolah perlu menerapkan sistem pendisiplinan yang adil tanpa kekerasan, membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), mengimplementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran dan keteladanan guru, serta menjalin kerjasama aktif dengan orang tua. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kedisiplinan berjalan efektif secara edukatif, tetapi juga membangun iklim sekolah yang aman, kondusif, dan mampu mengembangkan karakter peserta didik secara moral, sosial, dan emosional sesuai prinsip Pancasila.

### KESIMPULAN

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan tindakan negatif yang melanggar norma, etika, dan hak peserta didik, yang dapat mengganggu kedisiplinan serta mencederai martabat individu. Kekerasan yang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua dan Sila Kelima. Kejadian ini dipicu oleh ketidakpatuhan siswa, persepsi terbatas guru, anggapan bahwa kekerasan efektif untuk mendisiplinkan, serta pola asuh keluarga. Dampak yang muncul mencakup menurunnya kedisiplinan, hilangnya kepercayaan siswa dan orang tua terhadap sekolah, serta penurunan citra lembaga pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan sistem pendisiplinan yang adil tanpa kekerasan, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran dan keteladanan guru, serta kerjasama aktif dengan orang tua, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, kondusif, dan mampu membentuk karakter peserta didik berlandaskan etika, moral, dan nilai Pancasila.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyelesaian penelitian ini. Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak SMA Negeri 1 Cimarga dan semua yang terlibat dalam penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan praktik pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fadilah, N., & Najicha, F. U. (2022). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SILA PERTAMA DALAM ERA PEMBELAJARAN DARING UNIVERSITAS SEBELAS MARET*. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>
- Ika, F., Putri, A., Pratiwi, I. A., & Purbasari, I. (2025). *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan Pengaruh Implementasi Nilai Sila Ketiga Pancasila Terhadap Karakter Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar*. 4, 1784–1795. <https://doi.org/10.56916/ejip.v4i4.2326>
- Jabbar, N. I., Padmawati, I. A. S., Santika, A., Nunung, B., Aprillia, D., & Syahrina, M. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI PADA SISWA SMP NEGERI 7 MATARAM*.
- Pebriani, Y. N., Dinie, &, & Dewi, A. (2022). PERAN GURU DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Rismawati, Rahim, A., & Nur, J. (2019). *Jurnal Etika Demokrasi Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Sekolah* (Vol. 4, Issue 2). [www.unismuh.ac.id](http://www.unismuh.ac.id)
- Rizqullah, T. M., & Najicha, F. U. (2022). Pegimplementasian Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2630–2633.
- Sabir, A. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sikap Dan Prilaku Siswa* (Vol. 5, Issue 2). <https://ejournal.ummuba.ac.id/index.php/pgsd/login>
- Saraswati, J., Ramadhani, E., Surtiyoni, E., & PGRI Palembang, U. (2019). *ANALISIS BIMBINGAN KELOMPOK TENTANG PELANGGARAN TATA TERTIB TERHADAP SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PGRI 5 PALEMBANG* (Vol. 2, Issue 2).
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Ageng, P., Suri, A., & Nugraha, R. G. (2022). PERILAKU BULLYING YANG MENYIMPANG DARI NILAI PANCASILA PADA SISWA SEKOLAH. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).